

PBNU Minta Parpol Tak Manfaatkan Kiai-Ibu Nyai Jadi Juru Kampanye

JAKARTA (IM) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta partai politik, politikus dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika.

Sebab itu, PBNU mendorong agar tokoh agama seperti kiai atau ibu nyai tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang bersifat praktis.

Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan, kiai atau ibu nyai memiliki tugas sangat luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia. Seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri.

Tak hanya itu, peran kiai atau ibu nyai juga sangat besar dalam mengajarkan akan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

"Intinya kiai atau ibu nyai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman dengan harapan santri bermanfaat untuk masyarakat. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek, apalagi sekadar menjadi jurkam (juru kampanye)," ujar Ishfah melalui keterangan tertulis, Rabu

(18/1). Pemanfaatan kiai atau ibu nyai dalam percaturan politik praktis justru akan mengerdikan peran strategis para tokoh dan pemuka agama Sebab ada tugas lebih besar yang diemban kiai dan ibu nyai dalam pendidikan maupun dakwah.

Ishfah berharap, para pihak yang berniat memanfaatkan para kiai, ibu nyai dan tokoh agama, bisa berpikir jernih dan tidak hanya mementingkan kepentingan politik pendek. Selain akan mendegradasi tugas utama kiai dan ibu nyai, menurutnya hal ini juga rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Ishfah pun sangat berharap para kiai menjadi garda terdepan untuk menebarkan nilai-nilai keadamaan.

"Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik, sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk bawa-bawa bendera ormas," jelasnya.

Lebih lanjut Ishfah mengatakan, melalui keputusan NU yang kembali ke Khittah 1926, NU dengan tegas mengembalikan perjuangan organisasi seperti saat awal didirikan, yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam'iyah diniyyah ijtimaiyyah). ● **han**

Ayah Brigadir J Kecewa ke Jaksa, PC Hanya Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat mengaku kecewa kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut Putri Candrawathi (PC), terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, 8 tahun penjara.

"Kecewa," ujar Samuel saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/1).

Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas mengomentari pernyataan pengacara Putri soal adanya belasan fakta hukum yang dinilai asuntif. Menurutnya, hal itu sejatinya hanyalah halusinasi kubu Putri belaka. Pasalnya, bukti yang disampaikan kubu Putri saja tak ada yang relevan.

Selain itu, tambahnya, keluarga Brigadir J kecewa soal Jaksa yang menyebut adanya perselingkuhan antara Brigadir J dengan Putri. Apalagi, orang tua Brigadir J selalu menanamkan nilai pada Brigadir J untuk menghormati, berlaku baik, dan berterima kasih pada orang yang merawatnya, dalam hal ini Putri dan Ferdysambo. "Sangat kecewa lah, enggak mungkin Yosua mau selingkuh dengan orang yang lebih tua, dan itu kan dianggap orang tua angkatnya. Orang tua itu bisa siapa saja yang lebih tua, secara spesifik orang tua kandung, tapi yang di lingkungan kerja juga harus dihormati," katanya. ● **han**

FOTO: ANT



SIDANG TUNTUTAN PUTRI CANDRAWATHI
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1). Istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdysambo, Putri Candrawathi, dituntut 8 tahun penjara.

2 Poinhukum

FOTO: ANTARA



Jokowi Perintahkan Menkumham Koordinasi ke DPR untuk Percepat Pengesahan RUU PPRT

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia tak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Sementara RUU PPRT hingga kini belum juga disahkan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk berkoordinasi dengan DPR guna

segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT).

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan untuk

segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Negara, Rabu (18/1).

Jokowi mengatakan, dirinya bersama dengan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

"Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, kata Jokowi, tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga.

"RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR," kata Jokowi.

Jokowi berharap dengan DPR dapat segera mensahkan RUU PPRT untuk memberikan perlindungan para pekerja rumah tangga.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja," katanya.

Jaminan Sosial bagi PRT

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah menginginkan

RAPAT KERJA KOMISI IV DENGAN MENTERI LHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) berbincang dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023.

agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT). "Yang termasuk diatur dalam RUU PPRT ini perlindungan dan jaminan sosial, baik perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1).

Ida menyebutkan, ketentuan mengenai jaminan sosial bagi PRT belum ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, sejauh ini juga belum ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur perlindungan bagi PRT.

"Kami memandang bahwa peraturan yang lebih tinggi di atas peraturan menteri ketenagakerjaan itu diperlukan," ujarnya. ● **han**

TERKAIT KASUS KORUPSI LUKAS ENEMBE

KPK Tengah Dalam Pengelolaan Dana Penyelenggaraan PON XX di Papua

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami berbagai proyek dan kegiatan yang diduga menjadi bancakan Gubernur Papua, Lukas Enembe (L.E). Salah satu kegiatan yang bakal didalami KPK yakni terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021 lalu.

Penyidik KPK akan mendalami penggunaan serta pengelolaan dana PON XX Papua yang bersumber dari anggaran negara Rp10,43 triliun.

"Jadi kalau itu menyangkut suatu kegiatan atau proyek, seperti kemarin sudah disebutkan, salah satunya terkait dengan pertanggungjawaban dana PON di Papua, tentu akan kami dalam semua informasi tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Lukas Enembe diduga bukan hanya menyeleangkan dana sejumlah proyek. Setidaknya, sudah ada dua

proyek anggaran pemerintah untuk Papua yang sedang disorot KPK. Pertama, terkait dana otonomi khusus (otus) Papua. Kedua, soal dana PON XX di Papua.

Selain itu, KPK juga membuka peluang menjerat Lukas Enembe di kasus lainnya. Diperkirakan dugaan korupsi Lukas Enembe mencapai Rp1 triliun. KPK bakal mengembangkan kasus rasuah di Papua, terutama yang menyeret Lukas Enembe. Aliran uang Lukas Enembe juga sedang dikembangkan.

Pengembangan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Tanah Tabi bakal didalami lewat pemeriksaan saksi-saksi. Penyidik KPK bakal mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi yang menjerat Lukas dengan melakukan pengecekan di sejumlah tempat.

"Makanya kemudian kan kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ke depan juga masih terus kemudian kami lanjutkan, mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk terus mengembangkan fakta-fakta yang se-

belumnya kami peroleh," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi terpisah.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.

Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK juga sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut. ● **mei**

Usut Kasus Korupsi BAKTI Kominfo, Kejagung Cegah 23 Orang ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muda Intelijen menetapkan keputusan tentang pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Kemenkominfo.

"Pada 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangan resminya, Rabu (18/1).

Ketut Sumedana menjelaskan, keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama enam bulan.

"Karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dan demi kepentingan untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pemeriksaan guna menggali informasi terkait perkara dimaksud, ke-23 orang tersebut telah dicegah ke luar negeri dan masih tetap berada di wilayah hukum

Republik Indonesia," katanya.

Diketahui, saat ini tengah bergulir penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo.

Adapun 23 orang tersebut ialah: BI (Direktur PT Surya Energi Indotama), AA (Direktur Niaga PT Aplikasi Lintasarta), MA (Account Director PT Huawei Tech Investment), AAL (Direktur Utama BAKTI Kemkominfo), FM (Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kemkominfo), AJ (Direktur Keuangan BAKTI Kemkominfo), DJI (Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kemkominfo), DAF (Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kemkominfo).

Kemudian, BN (Direktur Infrastruktur BAKTI Kemkominfo), MJ (Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), BS (Direktur Utama PT Telkominfra), JS (Direktur Utama PT Sansaine Exindo), BP (Direktur PT Multi Trans Data), LWX (Direktur PT ZTE Indonesia), LWQ (Direktur Utama PT ZTE Indonesia).

HJ (Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), AS (Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera), MFM (Kepala Divisi Lastmil/ Backhaul BAKTI Kemkominfo), EH (Pegawal BAKTI Kemkominfo), GMS (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), CM (CEO PT Huawei Tech Investment), LH (CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia), dan DM (Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia). ● **han**

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARMADA MARITIME OFFSHORE

Dengan ini, Direksi PT Armada Maritime Offshore, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /03 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021;
3. Pembebasan tanggung-jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 19 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Armada Maritime Offshore

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PUTRA UTAMA LINE

Dengan ini, Direksi PT Putra Utama Line, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /03 Februari 2023
Waktu : Pukul 11.30 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021;
3. Pembebasan tanggung-jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 19 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Putra Utama Line

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUKSES MARITIME LINE

Dengan ini, Direksi PT Sukses Maritime Line, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /03 Februari 2023
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021;
3. Pembebasan tanggung-jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 19 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Sukses Maritime Line

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUKSES OCEAN KHATULISTIWA LINE

Dengan ini, Direksi PT Sukses Ocean Khatulistiwa Line, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /03 Februari 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021;
3. Pembebasan tanggung-jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 19 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Sukses Ocean Khatulistiwa Line

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARMADA BUMI PRATIWI LINES

Dengan ini, Direksi PT Armada Bumi Pratiwi Lines, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /03 Februari 2023
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021;
3. Pembebasan tanggung-jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 19 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Armada Bumi Pratiwi Lines